

PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN (TNBK) DI PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI PENJAGAAN KEAMANAN PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT)

Oleh:

Ribka Kezia Harefa¹, Pujo Widodo², Makmur Supriyatno³

Universitas Pertahanan
harefaribka@gmail.com

ABSTRACT

Borders are important part of state's sovereignty and becomes a fortress of any kinds of threats. Threats on the security of natural resources is one form of non-military threat that affects the security of the country. Betung Kerihun National Park is adjacent north to the Malaysian borders; making it vulnerable to threats. The purpose of this research is to analyze the threat of security towards the management of Betung Kerihun National Park (TNBK), the efforts made to overcome the security threat, and the management of TNBK on the Indonesia-Malaysia border. The research implements a qualitative methodology using in-depth interviews followed by analyzing the primary and secondary data. The results show that the security threats of TNBK are agarwood theft, gold mining, illegal logging, wildlife trafficking, lack of security staff, absence of security forces (Satgas Pamantas) on the northern boundary of TNBK, and JIPP development. The efforts to overcome security threats are preventive, preemptive, and repressive. The management of TNBK on the Indonesia-Malaysia border to protect border security include management functions of planning, organizing, leading (directing), and evaluating. Although the northern boundary of the national park is at national borders, but the security duty remains the responsibility of the military (TNI). The role of TNI needs to be improved in protecting the border of the country that lies on the northern boundary of the national park and the need for enhanced coordination and cooperation between TNI and TNBK. TNBK also needs to manage the buffer zone to overcome the threats made by the community around the national park.

Keywords: Security Threats, Border Security, Management, National Parks

¹ Mahasiswa alumni S2 Program Studi Manajemen Pertahanan, Cohort 8, Universitas Pertahanan

²Dosen Universitas Pertahanan

³Dosen Universitas Pertahanan

PENDAHULUAN

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah satu tujuan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini berkaitan dengan kepentingan nasional yaitu menjaga dan melindungi kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga keselamatan dan kehormatan bangsa. Nyatanya dalam mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI, masih terdapat masalah yang terkait dengan perbatasan negara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sudah menjadi tugas TNI menjaga keutuhan wilayah NKRI dan mempertahankan kesatuan wilayah kedaulatan negara dari segala ancaman di perbatasan. Salah satu tugas ini merupakan tugas pokok TNI yaitu mengamankan wilayah perbatasan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 pasal 7. Namun tugas TNI di perbatasan masih belum optimal karena tidak didukung transportasi, logistik, alat komunikasi, sarana prasarana, dan anggaran. Hal ini menyebabkan masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran di perbatasan.

Keamanan perbatasan menjadi perhatian penting bagi negara yang berbatasan langsung dengan negara lain. Perbatasan merupakan beranda terdepan negara yang menjadi benteng pertahanan dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional. Ancaman terhadap keamanan nasional tidak hanya ancaman yang bersifat militer tetapi juga ancaman yang bersifat non-militer. Ancaman terhadap keamanan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk ancaman yang berdampak pada keamanan negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga sumber daya alam yang berada dalam otoritas wilayah kedaulatannya dari segala bentuk ancaman. Namun pengelolaan sumber daya alam saat ini belum berjalan dengan baik. Pemerintah belum memiliki ketegasan dalam pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya terjadinya pencurian sumber daya alam yang dapat merugikan negara serta masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Populasi yang terus meningkat ditambah dengan globalisasi dan industrialisasi mempengaruhi ekosistem di bumi, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas⁴. Saat ini eksploitasi sumber daya alam dilakukan terus menerus dengan tidak terkendali. Bahaya yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan berdampak di seluruh perbatasan negara dengan konsekuensi yang merugikan. Salah

⁴ Ashok Swain, *Understanding Emerging Security Challenges Threat and Opportunities*, (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2013), hlm.5.

satu ancaman dari degradasi lingkungan adalah menurunnya tutupan lahan hutan karena deforestasi. Deforestasi menjadi faktor utama dalam permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi kekhawatiran tingkat global.

Salah satu kawasan dilindungi yang berada di perbatasan Kalimantan adalah Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK). Batas Utara TNBK berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Kawasan ini merupakan salah satu daerah berkesinambungan terbesar untuk hutan yang tersisa di Kalimantan. Namun permasalahan yang terjadi adalah masih terdapat aktifitas penebangan ilegal maupun perburuan satwa yang dilindungi⁵. Sedangkan dalam rangka pengamanan batas negara yang juga merupakan batas utara kawasan TNBK maka yang bertugas adalah TNI. Namun yang terjadi tidak ada TNI yang menjaga di perbatasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan dalam menjaga keamanan batas negara.

Pengelola taman nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan. Di TNBK satuan pengamanan wilayah taman nasional di bagi atas resort-resort. Nyatanya jumlah polisi hutan yang ada yaitu 14 orang sedangkan luas taman TNBK adalah 816.693,40 ha. Dari segi kuantitas masih kurang memenuhi standar pengelolaan kawasan untuk ditempatkan di resort.

⁵Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.171.

Kondisi topografi di TNBK tergolong berat dengan tingkat kecuraman yang tajam dan berbukit-bukit. Selama ini antar pos-pos di perbatasan tidak memiliki jalan sendiri, harus memutar melalui jalan utama, jauh dari pemukiman penduduk, dan hanya ditempuh dengan berjalan kaki. Keadaan ini membuat patroli pengamanan kawasan menjadi sulit. Permasalahan yang timbul adalah ketika ada laporan terkait pelanggaran hutan, aparat yang mendatangi lokasi tidak menemukan aktifitas pelanggaran tetapi hanya bekasnya saja.

Berdasarkan fenomena tersebut, pengelolaan TNBK dalam hal keamanan menjadi masalah penting yang perlu diperhatikan, terlebih lagi kawasan TNBK berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang rentan terhadap ancaman. Hingga saat ini pengelolaan keamanan hanya dilakukan oleh pihak TNBK dengan TNI/Polri. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman keamanan dalam pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) di perbatasan Indonesia dan Malaysia, menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi ancaman keamanan tersebut, dan menganalisis pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) di perbatasan Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan perbatasan Kalimantan Barat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi

dan memahami suatu gejala sentral⁶. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif atau tidak dinominalkan. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil dari data tersebut berupa penggambaran atau deskripsi, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Data yang dihasilkan berupa kata-kata yang diucapkan maupun ditulis oleh seseorang serta perilaku atau fenomena yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau data yang belum mengalami proses statistik⁷. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh orang lain⁸. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penunjang dari sumber data primer yang digunakan seperti buku, laporan tahunan, dan pelbagai dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terkait dengan isu yang diangkat, meliputi: Kepala Bidang Teknis Konservasi TNBK, Koordinator Polisi Hutan TNBK, Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) TNBK, Kepala Seksi Pengelolaan TN Wilayah I, Kepala Resort Sebaibai, Danyonif Satgas Pamtas Yonif 123

Rajawali, Danpos Klawik Satgas Pamtas Yonif 123 Rajawali, Kasdim Kodim 1206 Putussibau, dan Babinsa Koramil 1206-03/Batang Lupar. Objek penelitian adalah Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan komponen-komponen analisis data Miles dan Huberman, yaitu model interaktif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications*⁹.

Pengujian keabsahan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode pengujian keabsahan yaitu triangulasi dan *member checking*. Triangulasi berarti menggunakan bermacam-macam data, menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan melibatkan banyak peneliti. Kemudian dilakukan *member checking* yang merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data yaitu narasumber di TNBK, Satgas Pamtas, Kodim Putussibau, dan Koramil Batang Lupar.

Peneliti menggunakan pengujian transferability yaitu membuat laporan dengan memberikan uraian

⁶John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

⁷C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, (New Delhi: New Age International Publishers, 2004).

⁸*ibid.*

⁹Matthew B. Miles – A. Michael Huberman – Jonny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi Ketiga (California: SAGE Publications, 2014), hlm.12.

yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

PEMBAHASAN

Ancaman keamanan dalam pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) di perbatasan Indonesia dan Malaysia

Ancaman terhadap keamanan yang dihadapi Taman Nasional Betung Kerihun termasuk ancaman terkait dengan ekologi. Sesuai dengan pernyataan Buzan (1991) bahwa salah satu kategori ancaman berdasarkan sektornya terhadap keamanan nasional adalah ancaman ekologi¹⁰. Keamanan kawasan di taman nasional berkaitan dengan adanya gangguan maupun ancaman yang terjadi di kawasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ancaman keamanan dalam pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) di perbatasan Indonesia dan Malaysia adalah pengambilan gaharu, penambangan emas tanpa izin, illegal logging, peredaran satwa, kurangnya staf atau personil pengamanan, tidak ada satgas pamtas di batas utara sehingga memungkinkan pencurian sumber daya alam milik negara dengan masuknya HPH Malaysia ke dalam wilayah TNBK, dan pembangunan JIPP yang dapat bertentangan dengan kelestarian kawasan TNBK.

Sesuai dengan penelitian terdahulu, Trimarsito (2010) menyatakan bahwa di TNBK gangguan kawasan yang terjadi

meliputi penebangan kayu, pembukaan lahan, dan penambangan emas¹¹. Jenis-jenis gangguan yang dijumpai di setiap resort dapat berbeda-beda tergantung kondisi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar resort.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Carey et al. (2000), bahwa ancaman yang dihadapi kawasan lindung diantaranya adalah pertambangan dan pencurian hasil hutan¹². Gangguan tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan. Sesuai dengan pernyataan Moore et al. (2018) bahwa ancaman yang lebih tinggi terjadi dekat jalan yang lebih mudah diakses serta dekat dengan habitat manusia¹³.

Dalam laporan khusus penanganan kasus illegal logging Taman Nasional Betung Kerihun, keparahan akibat penebangan liar di TNBK diindikasikan oleh banyaknya jaringan jalan logging dalam kawasan taman nasional yang telah tembus ke wilayah Malaysia. Sesuai pernyataan Carey et al. (2000) dengan membuka hutan, perdagangan kayu ilegal berdampak pada terbukanya jalan atau jalur akses lainnya yang sedang dibangun dan dengan demikian juga meningkatkan kegiatan terkait seperti

¹¹ Bambang Hari Trimarsito, *Kinerja Pengamanan Taman Nasional Berbasis Resort (Kasus Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Alas Purwo)*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2010).

¹² Christine Carey, et al., *Squandering Paradise? The Importance and Vulnerability of the World's Protected Area*, (Switzerland: WWF, 2000), hlm.36.

¹³ Moore, et al, "Are ranger patrols effective in reducing poaching-related threats within protected?" *Journal of Applied Ecology*, Vol. 5. No. 1. January 2018.

¹⁰ Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-cold War Era*, (Colchester: ECPR Press, 1991).

penambangan liar, perburuan dan permukiman liar¹⁴.

Ancaman lain yang dapat menjadi permasalahan adalah peredaran satwa. TNBK memiliki potensi keanekaragaman satwaliar yang tinggi baik itu burung, mamalia, reptilia maupun herpetofauna. Potensi ini dapat menjadi ancaman terkait perburuan satwa yang kemudian diperjualbelikan secara illegal. Saat ini kasus peredaran satwa memang belum pernah terjadi baik itu beredar hingga ke negara Malaysia atau di negara Indonesia sendiri. *Carey et al.* (2000) menyatakan apabila penduduk lokal miskin atau nilai potensi satwa liar tinggi, perburuan dan perburuan liar dapat menjadi aktivitas endemik dan sangat merusak¹⁵.

Kurangnya kapasitas manajemen merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap ancaman yang dihadapi kawasan dilindungi. Jumlah personil keamanan yaitu Polhut di TNBK adalah 14 orang yang tersebar di setiap resort sedangkan luas TNBK adalah 816.693,40 hektar. Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah personil keamanan di TNBK masih kurang. Menurut *Carey et al.* (2000) kurangnya kapasitas manajemen salah satunya adalah kurangnya staf. Kurangnya jumlah personil polhut berpengaruh terhadap ancaman yang dihadapi taman nasional¹⁶. Dengan jumlah personel yang ada maka dapat menjadi salah satu kesulitan dalam melakukan kegiatan pengamanan yang efektif sehingga akan

berpengaruh dalam mengatasi gangguan ataupun ancaman yang dihadapi taman nasional.

Tugas perlindungan dan pengamanan kawasan TNBK adalah tanggung jawab pengelola TNBK sedangkan tugas pengamanan di batas negara adalah TNI yang merupakan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia (Satgas Pamtas). Satgas pamtas di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang bertugas saat ini adalah Yonif 123 Rajawali. Namun di sepanjang garis batas negara yang merupakan batas utara TNBK sepanjang 368 km tidak ada pos pamtas dan belum pernah dilakukan patroli perbatasan hingga menembus batas sektor timur. Tidak adanya patroli rutin di perbatasan yang kebetulan menjadi batas kawasan utara TNBK dapat mejadi ancaman keamanan bagi negara Indonesia.

Saat ini pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) di kawasan Kalimantan Barat sedang berjalan sesuai dengan salah satu program prioritas Kabinet Kerja yaitu membangun Indonesia dari pinggir. JIPP merupakan bagian dari pembangunan fisik yang akan dibangun sepanjang perbatasan darat Malaysia dan Indonesia di Kalimantan dengan panjang total 2019 km. Letak kawasan TNBK yang berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah utara masuk dalam sasaran pembangunan JIPP yang sedang berlangsung. Namun di satu sisi pembangunan JIPP ini dapat menjadi sebuah ancaman bagi kawasan TNBK itu sendiri. *Carey et al.* (2000) mengatakan bahwa jalan atau jalur

¹⁴Christine Carey, *et al.*, *op.cit*, hlm 58.

¹⁵*Ibid*, hlm 51.

¹⁶*Ibid*, hlm 28.

menuju kawasan lindung mendorong kerusakan, melalui tekanan jumlah wisatawan yang meningkat atau melalui pemanfaatan sumber daya ilegal dan perkampungan¹⁷. Ada keterkaitan yang jelas antara pembangunan jalan dengan peningkatan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perburuan liar maupun pembalakan liar karena mudahnya akses melalui jalan atau sungai. Selain itu pembangunan jalan di kawasan taman nasional dapat menyebabkan kematian satwa karena tertabrak saat melintasi jalan, mudahnya penyebaran hama dan penyakit serta meningkatkan fragmentasi habitat sehingga menghambat pergerakan beberapa spesies dan dapat menyebabkan terisolasinya spesies satwa.

Upaya mengatasi ancaman keamanan dalam pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) di perbatasan Indonesia dan Malaysia

Upaya mengatasi ancaman keamanan dalam pengelolaan TNBK di perbatasan Indonesia dan Malaysia adalah melalui kegiatan preventif, preemtif, dan represif. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 bahwa tugas dan fungsi Polhut dilaksanakan dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan preventif dilakukan dengan patroli darat, air, dan udara serta identifikasi kerawanan, gangguan, dan ancaman. Kegiatan preemtif dilakukan dengan penyuluhan, penyadartahuan,

sosialisasi, dan kerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan TNBK. Kegiatan represif dilakukan dengan melaksanakan operasi penegakan hukum dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, kejaksaan, Balai Penegakan Hukum.

Patroli yang dilakukan yaitu patroli rutin, patroli gabungan, dan patroli fungsional. Patroli rutin dilakukan sebulan dua kali di masing-masing resort. Di TNBK personil pengamanan terdiri dari 1 sampai 2 orang di setiap resort. Patroli gabungan 1 tahun sekali yang dilakukan dengan TNI ataupun polisi. Kemudian patroli fungsional dilakukan jika ada target operasi apabila mendapat informasi akan adanya pelanggaran/tindak pidana bidang kehutanan.

TNBK memiliki tiga jenis patroli yaitu patroli darat, air, dan udara. Patroli darat dilakukan dengan berjalan kaki memasuki kawasan sedangkan penggunaan roda dua hanya bisa dilakukan di area kerja resort Sebabai. Patroli air dilakukan dengan melewati empat sub DAS yaitu DAS Embaloh, DAS Sibau, DAS Mendalam, dan DAS Hulu Kapuas menggunakan long boat berkekuatan mesin 40 PK. Adanya das di kawasan TNBK menjadi sebuah keuntungan dalam patroli karena topografi pegunungan dan perbukitan yang sulit dilalui jika melewati jalur darat.

Patroli udara dilakukan untuk menjangkau seluruh kawasan yang sulit dilalui dengan jalur darat maupun jalur air. Patroli udara menggunakan pesawat *Microlight trike* yang dikendarai oleh satu orang pilot dan

¹⁷Christine Carey, *et al.*, *op.cit.*, hlm 49.

satu orang navigator. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperoleh data dan informasi kawasan secara visual dalam rangka mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan. Oleh karena itu kegiatan patroli udara diperlukan sebagai langkah awal dalam kegiatan operasi pengamanan di lapangan sesuai target pencapaian. Jika ditemukan indikasi terjadi tindak pidana di dalam kawasan TNBK maka data ditindaklanjuti dengan operasi fungsional.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman. TNBK sudah mempunyai data potensi kerusakan dalam sebuah peta yang didalamnya terdapat sebaran potensi kerusakan yaitu penambangan emas, pengambilan gaharu, pengambilan ikan, pengambilan kayu, perburuan satwa, perladangan, longsor, pohon tumbang, dan titik panas. Hal ini sejalan dengan pendapat Moore *et al.* (2018) yang mengatakan bahwa meningkatkan efisiensi patroli polisi hutan dengan memprioritaskan area yang memiliki ancaman tinggi, berpotensi mengurangi ancaman dengan lebih efektif dan kebutuhan logistik yang lebih mudah¹⁸.

Kegiatan preemtif yang dilakukan yaitu dengan penyuluhan atau penyadartahuan kepada masyarakat seperti sosialisasi, anjungsana ke tokoh-tokoh masyarakat, maupun kampanye. Kegiatan penyuluhan atau penyadartahuan ini terkait mengenai kebakaran hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, larangan-

larangan di kawasan hutan. Pihak TNBK juga melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah.

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan merupakan hal yang mendasar, lingkungan dan manusia tidak dapat dipisahkan, apabila kualitas daya dukung lingkungan menurun maka kualitas hidup manusia pun akan ikut menurun. Kemf (1993) mengatakan banyak ekosistem dan lanskap budaya yang berada di dalam kawasan lindung bergantung pada sistem pengelolaan tradisional¹⁹. Oleh karena itu disini peran penting kegiatan preemtif dilakukan agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya menjaga lingkungan terhadap kehidupan yang berkelanjutan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai desa penyangga TNBK tentang peraturan mengenai pelanggaran bidang kehutanan serta hak-hak masyarakat yang diakomodir TNBK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan represif yang dilakukan di TNBK yaitu terkait dengan aktifitas Penambangan Illegal (Penambangan Emas) di Hulu Kapuas TN Betung Kerihun dan aktifitas pencarian gaharu di DAS Embaloh. Kegiatan represif di TNBK dilakukan melalui kerjasama dengan institusi lain seperti Balai Penegakan Hukum Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kejaksaan pengadilan, Polisi, ataupun TNI. Sesuai dengan pernyataan

¹⁸Moore, *et al*, *op.cit.*

¹⁹Elizabeth Kemf, *In Search of a Home, The Law of the Mother, Protecting Indigenous Peoples in Protected Areas*, (San Fransisco: Sierra Club Books, 1993).

Brandon et al. (2008) bahwa pengelolaan kawasan dilindungi yang efektif dan penegakan hukum untuk mengurangi ancaman sangat penting untuk konservasi keanekaragaman hayati²⁰.

Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2004, salah satu tugas pokok TNI yaitu mengamankan wilayah perbatasan. Inti dari tugas mengamankan wilayah perbatasan negara adalah untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan menjaga keselamatan bangsa di wilayah perbatasan dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran. Selain itu, penempatan pasukan pengamanan perbatasan kedua negara atas kesepakatan bilateral pada pertemuan *General Border Committee* (GBC). Namun yang terjadi di batas utara TNBK tersebut tidak ada pos pamtas dan tidak ada personil satgas pamtas yang bertugas dikarenakan topografi yang sulit. Berdasarkan faktor lansekap geografi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia berupa pegunungan atau disebut dengan "*watershed boundary*" atau "*topographic divided*"²¹. Disebut *watershed boundary* karena memang rangkaian pegunungan tersebut membatasi antara Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di teritori Indonesia dengan di Malaysia, sedangkan penyebutan *topographic divided*, karena memang rangkaian

ketinggian tersebut selain memisahkan kawasan DAS, juga berfungsi sebagai pemisah atau *obstacles* antara kedua teritori yang berbeda tersebut. Karena bentuknya berupa rangkaian pegunungan, maka secara umum untuk mencapai ke titik atau garis perbatasan tidak mudah terutama melalui jalur darat. Sistem zonasi kawasan TNBK juga mempengaruhi. Apabila pos penjagaan tidak ada maka akan menjadi kesulitan bagi satgas pamtas untuk melakukan pengamanan perbatasan di wilayah tersebut. Oleh karena itu bentuk pertahanan di perbatasan ini masih mengandalkan lansekap geografi.

Pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun di perbatasan Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan perbatasan Kalimantan Barat

Pengelolaan taman nasional bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Manajemen adalah proses menyatukan dan menggunakan segala sumber daya dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan tugas dalam organisasi²². Pengelolaan TNBK di perbatasan Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan perbatasan Kalimantan Barat meliputi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan evaluasi.

²⁰ Katrina Brandon, et al, *Parks in peril: People, Politics, and Protected Areas*, (Washington, DC: Island Press, 1998).

²¹ Makmur Supriyatno, *Pertahanan dan Batas Darat Internasional*, (Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu, 2016), hlm.38.

²²Michael A. Hitt, et al, *Management, Third Edition*, (New Jersey: Pearson education, 2012), hlm.4.

Pengelolaan kawasan Taman Nasional Betung Kerihun sebagai kawasan konservasi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 467/kpts-II/1995 tanggal 5 September 1995 dengan luas 816.693,40 Ha sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3075/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014. TNBK dikelola berdasarkan zonasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen PHKA Nomor: SK.120/IV-KK/2009 tanggal 15 Juli 2009 sehingga terbagi dalam enam zona.

Fungsi Perencanaan

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNBK periode 2016-2025, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengamanan ekosistem adalah melakukan patroli kawasan secara rutin baik darat maupun udara, penyuluhan, anjungsana, pemasangan papan-papan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dan himbauan/larangan. Rencana kegiatan perlindungan dan pengamanan ekosistem dilakukan di semua zona kawasan di sub DAS Embaloh, Sub DAS Mendalam, Sub DAS Sibau dan Sub DAS Hulu Kapuas.

Dalam pengelolaan TNBK di perbatasan Indonesia dan Malaysia terdapat perencanaan yang cukup jelas dalam menjaga keamanan kawasan TNBK berdasarkan tujuan pengelolaan yaitu menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai

habitat berbagai jenis flora dan fauna langka dan dilindungi. Perencanaan meliputi aksi prioritas dengan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan sudah dikomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pengelolaan TNBK tidak terlepas dari kegiatan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kapuas Hulu. Sesuai dengan teori Worboys et al. (2005) perencanaan adalah fungsi utama manajemen yang menjadi dasar penting dalam konteks lingkungan, sosial, budaya, historis, manajerial dan politik²³. Dengan memasukkan pemodelan dan analisis data, perencanaan dapat mengidentifikasi masa depan, keadaan dan kondisi sehingga dapat difasilitasi.

Fungsi pengorganisasian

Pengorganisasian di TNBK dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing dari setiap unit kerja. Berdasarkan struktur organisasi di TNBK, tugas pokok/misi jabatan setiap unit kerja di dalam susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional. Ujung tombak dari suatu keberhasilan pengelolaan taman nasional terletak pada peranan petugas lapangan yaitu polisi hutan dalam melakukan kegiatan pengelolaan dalam bidang perlindungan dan pengamanan hutan, monitoring dan pengendalian keanekaragaman hayati serta kegiatan lainnya yang bersifat pendekatan kepada masyarakat.

²³Graeme L. Worboys – Ted Trzyna, *Managing Protected Area*, (Canberra: ANU Press, 2015), hlm 211.

Di setiap resort TNBK tersebar dua hingga tiga orang polhut yang sudah mempunyai wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian untuk mendukung kapasitas polhut, maka dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan. Oleh karena itu TNBK melakukan pelatihan-pelatihan yang setiap tahunnya diadakan. Sesuai dengan teori Worboys et al. (2005) yang mengatakan tindakan manajemen perlu direncanakan secara menyeluruh dalam 'fungsi pengorganisasian' yang disusun secara efisien dan efektif dengan mengkoordinasikan keahlian sumber daya manusia, sumber material, peralatan dan layanan pendukung seperti transportasi, akomodasi dan dukungan keselamatan, yang diperlukan untuk melakukan tindakan atau aksi²⁴.

Pengelolaan TNBK yang berada di perbatasan juga perlu didukung alat peralatan, baik itu disiapkan oleh TNBK, satgas pamtas, kodim, koramil, maupun instansi lainnya yang terkait di daerah perbatasan. Muradi (2015) mengatakan medan yang sulit dan peralatan yang minim menjadi bagian permasalahan tidak efektifnya pengelolaan pengamanan perbatasan, sehingga untuk mengefektifkan dan meminimalkan hal tersebut harus ditopang oleh kuantitas dan kualitas peralatan yang baik yaitu dengan menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan, seperti radar, navigasi, alat

komunikasi, jaringan komunikasi, kendaraan patroli, dan alutsista²⁵.

Fungsi penggerakkan

Unit pengelolaan TNBK dilakukan hingga unit pengelolaan terkecil yaitu dengan adanya resort-resort yang berjumlah enam resort tersebar di setiap seksi pengelolaan TNBK. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan, kawasan konservasi perlu dibagi ke dalam unit-unit pengelolaan yang lebih kecil agar tujuan pengelolaan dapat diwujudkan.

Sudah menjadi salah satu tugas Balai Besar TNBK untuk melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan kegiatan masyarakat yang bersifat merusak kawasan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial, budaya dan perekonomian mereka. Pengaturan yang akan disepakati adalah kelompok masyarakat mana yang diberikan akses untuk melakukan pemungutan/pemanfaatan potensi kawasan, tata cara pemungutan, hak dan kewajiban masing-masing kelompok. Melalui kerjasama ini masyarakat dengan tenang dapat melakukan pemungutan/pemanfaatan potensi kawasan, sehingga ekonomi

²⁴*ibid*, hlm 211

²⁵ Muradi. "Pengelolaan pengamanan perbatasan Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No.1.

masyarakat akan terbantu, dan tak kalah pentingnya adalah kawasan akan lebih terjaga karena salah satu kewajiban kelompok masyarakat yang mendapat ijin adalah ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan. Sesuai dengan teori Worboys et al. (2005) yang mengatakan bahwa fungsi penggerakkan melibatkan orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk membantu mencapai tugas dan melakukan tindakan untuk memenuhi tujuan sebuah organisasi²⁶. Fungsi penggerakkan dapat terwujud dalam banyak hal pada tingkat orang ke orang tergantung pada sifat tindakan manajemen, konteks situasional untuk tindakan dan latar belakang, pengalaman dan kompetensi orang-orang yang bersangkutan.

TNBK berbatasan langsung dengan negara Malaysia di sebelah utara sehingga dalam pengelolaannya pun memiliki sedikit perbedaan dengan taman nasional lainnya. Untuk menjaga keamanan kawasan di batas utara yang merupakan batas negara Indonesia, maka pihak pengelola TNBK melakukan kerjasama dengan TNI dalam hal ini adalah Satgas Pamtas. Kerjasama dilakukan dengan satgas pamtas karena TNBK berbatasan dengan batas negara di sebelah utara sedangkan kerjasama dilakukan dengan kodim dan koramil karena TNBK termasuk dalam wilayah teritorial Kodim Putussibau dan Koramil Batang Lupar. Sesuai dengan pernyataan Muradi (2015) salah satu pengelolaan perbatasan

yang dilakukan adalah mengupayakan dan meningkatkan pembinaan wilayah, pembinaan teritorial serta pembinaan masyarakat di wilayah perbatasan²⁷. Langkah ini dilakukan agar terjadi harmonisasi dan koordinasi yang efektif antar-instansi dan mengintegrasikannya bagi pengamanan perbatasan secara integral. Penguatan potensi pertahanan dan militer dapat dilakukan khusus di wilayah perbatasan.

Fungsi evaluasi

Berbagai program pengelolaan yang telah dilaksanakan TNBK secara periodik harus dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat ditentukan langkah-langkah selanjutnya demi tercapainya tujuan dan sasaran sesungguhnya.

Berdasarkan Laporan Capaian Renja Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum Tahun 2016, Balai Besar TNBKDS menargetkan 1 (satu) provinsi dalam Indikator Kinerja (IKK) kegiatan jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi. Capaian Balai Besar TNBKDS pada tahun 2016 adalah sebesar 100% atau sebanyak 1 (satu) provinsi dengan serapan anggaran 99,54%. Dalam rangka merefleksikan dan mewujudkan IKK berupa jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 provinsi yang telah ditetapkan oleh Ditjen KSDAE, Balai Besar TNBKDS mempunyai 6 (enam) kegiatan berupa: patroli perlindungan dan pengamanan, patroli bersama

²⁶Graeme L. Worboys – Ted Trzyna, *op.cit.*, hlm 212.

²⁷Muradi, *op.cit.*

Masyarakat Mitra Polhut, patroli udara, patroli pencegahan kebakaran hutan / ground check hotspot, patroli pencegahan karhut bersama Manggala Agni non DAOPS, dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan melalui penyuluhan sebagaimana tertuang di dalam rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2016.

Worboys et al. (2005) mengatakan proses evaluasi merupakan peninjauan kemajuan pelaksanaan terhadap tujuan dan standar yang telah ditentukan²⁸. Evaluasi dapat mengidentifikasi apakah kegiatan pelaksanaan telah terpenuhi dan telah tercapai hasil yang diharapkan.

KESIMPULAN

Keamanan TNBK di perbatasan Indonesia dan Malaysia masih belum kuat karena masih terdapat ancaman keamanan berupa pengambilan gaharu, penambangan emas tanpa izin, illegal logging, peredaran satwa, kurangnya staf atau personil pengamanan yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan pengamanan, tidak ada satgas pamtas di batas utara sehingga memungkinkan pencurian sumber daya alam milik negara dengan masuknya HPH Malaysia ke dalam wilayah TNBK, dan pembangunan JIPP yang dapat bertentangan dengan kelestarian kawasan TNBK.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ancaman keamanan dalam pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) di perbatasan

Indonesia dan Malaysia adalah melalui kegiatan preventif, preemtif, dan represif. Preventif dilakukan melalui patroli baik darat, air, udara dan identifikasi gangguan ancaman. Preemtif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, penyadartahuan, sosialisasi, pemasangan papan-papan larangan kepada masyarakat sekitar kawasan, dan kerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan TNBK. Represif dilakukan dengan melaksanakan operasi penegakan hukum dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti TNI, Polri, kejaksaan, Balai Penegakan Hukum.

Pengelolaan TNBK di perbatasan Indonesia dan Malaysia dalam menjaga keamanan perbatasan meliputi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan evaluasi.

SARAN

1. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai dampak pembangun Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan baik dari sisi pertahanan negara dan sisi ekologi.
2. Perlu penelitian lebih lanjut dari sisi diplomasi pertahanan mengenai persepsi dua negara antara Malaysia dan Indonesia dalam menjaga keamanan sumber daya alam di daerah perbatasan.
3. Peran aktif TNI perlu ditingkatkan dalam menjaga perbatasan negara yang berada di batas utara kawasan TNBK karena tidak adanya penjagaan di wilayah tersebut.
4. Perlu adanya peninjauan lokasi yang dilakukan pihak TNBK dan

²⁸Graeme L. Worboys – Ted Trzyna, *op.cit*, hlm 212.

pihak TNI di batas negara Indonesia dan Malaysia yang merupakan batas utara TNBK untuk memastikan ada atau tidaknya pencurian sumber daya alam karena selama ini patroli yang dilakukan TNBK hanya pada titik-titik tertentu.

5. Perlu adanya pengelolaan daerah penyangga di TNBK untuk meningkatkan upaya mengatasi ancaman yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan TNBK,

REFERENSI

Buku

- BBTNBK. (2016). Laporan Tahunan tahun 2015. Putussibau: BBTNBK.
- BBTNBKDS. (2015). *Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun 2015-2019*. Putussibau: BBTNBKDS
- BBTNBKDS [Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum]. (2016). *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Betung Kerihun Provinsi Kalimantan Barat Periode 2016-2025*. Putussibau: BBTNBKDS.
- BBTNBKDS. (2017). *Laporan Capaian Renja Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum tahun 2016*. Putussibau: BBTNBKDS.
- BBTNBKDS. (2017). *Laporan Kinerja Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum tahun 2016*. Putussibau: BBTNBKDS
- Brandon, K., Redford, K. H., dan Sanderson, S. (1998). *Parks in peril: People, Politics, and Protected Areas*. Washington, DC: Island Press.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-cold War Era*. Colchester: ECPR Press.
- Carey, C., Dudley, N., dan Stolton, S. (2000). *Squandering Paradise? The Importance and Vulnerability of the World's Protected Areas*. Switzerland: WWF.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hitt, M. A., Black, S., dan Porter, L. W. (2012). *Management, 3rd edn*. New Jersey: Pearson education.
- Indrawan, M., Richard, B. P., dan Jatna, S. (2007). *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kemf, E. (1993). *In Search of a Home, The Law of the Mother, Protecting Indigenous Peoples in Protected Areas*. San Fransisco: Sierra Club Books.
- Kothari, C., R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International Publishers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. California: SAGE Publication Inc.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, J. (2008). *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Supriyatno, M. (2016). *Pertahanan dan Batas Darat Internasional*. Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu.

Swain, A. (2013). *Understanding Emerging Security Challenges Threat and Opportunities*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.

Worboys, G. L., dan Trzyna, T. (2015). *Managing protected areas*. Canberra: ANU Press.

Jurnal

Moore, J. F., F. Mulindahabi., M. K. Masozera., J. D. Nichols., J. E. Hines., E. Turikunkiko., dan M. K. Oli. (2018). Are ranger patrols effective in reducing poaching-related threats within protected areas?. *Journal of Applied Ecology* 5(1): 99 - 107.

Muradi. (2015). Pengelolaan pengamanan perbatasan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(1):26 – 34.

Tesis

Trimarsito, B. H. (2010). Kinerja Pengamanan Taman Nasional Berbasis Resort (Kasus Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Alas Purwo). Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun pasal 33 UUD 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang pedoman zonasi taman nasional

Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.75/Menhut-II/2014/ tentang Polisi Hutan